

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Bulan Januari 2022. - Inflasi Kota Batam Bulan Januari Tahun 2022 sebesar 0,74 persen. - Komoditas penyumbang inflasi di Bulan Januari Tahun 2022: Telur Ayam Ras 0,1072, Daging ayam Ras 0,0744, kangkung 0,0699, cuci kendaraan 0,0458, Cabai Rawit 0,0410, Bayam 0,0381, kue kering berminyak 0,0367, biaya pulsa ponsel 0,0343, bawang merah 0,0288, bahan bakar rumah tangga 0,0280. - Komoditas penyumbang Deflasi di Bulan Januari Tahun 2022: Angkutan udara -0,15947, Cabai Merah -0,1098, Minyak Goreng -0,0446, wortel -0,0121, biaya Administrasi transfer uang -0,0101, daging sapi -0,0039, ikan layang/ikan benggol -0,0038, anggur -0,0033, beras -0,0025, jamu -0,0025. 2. Bulan Februari 2022. - Deflasi Kota Batam Bulan Februari Tahun 2022 sebesar -0,48%. - Komoditas penyumbang inflasi di Bulan Januari Tahun 2022: Cabai Merah 0,05, Sabun Detergen bubuk/cair 0,04, Tomat 0,04, Ikan Selar/ikan Tude 0,02, Kacang Panjang 0,02, Ikan Bulat 0,01, Sotong 0,01, Cumi-Cumi 0,01, Ketimun 0,01, Bensin 0,01. - Komoditas penyumbang Deflasi di Bulan Januari Tahun 2022: Minyak goreng -0,31, Telur Ayam -0,20, Cabai Rawit -0,09, Daging Ayam Ras -0,06, Angkutan Udara -0,05, Telepon Seluler -0,04, Bayam -0,03, Bawang Merah -0,02, Wortel -0,01, Brokoli -0,01. 3. Bulan Maret 2022. - Inflasi Kota Batam bulan Maret tahun 2022 menunjukkan sebesar 0,73 persen. - Komoditas penyumbang inflasi di Bulan Januari Tahun 2022: Minyak Goreng 0,27, Cabai Merah 0,20, Angkutan Udara 0,13, Daging Ayam Ras 0,07, Emas Perhiasan 0,07, Bahan Bakar Rumah Tangga 0,03, Rokok Kretek Filter 0,02, Rokok Kretek 0,02, Sabun Detergen Bubuk/Cair 0,02, Bensin 0,02. - Komoditas penyumbang Deflasi di Bulan Deflasi Tahun 2022: Bawang Merah -0,05, Kangkung -0,05, Bayam -0,04, Ketimun -0,03, Wortel -0,03, Kacang Panjang -0,02, Brokoli -0,02, Bawang Putih -0,01, Jeruk -0,01, Makanan Ringan/Snack -0,01.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun permasalahan-permasalahan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam Triwulan I Tahun 2022 yang difokuskan berdasarkan kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) sebagai berikut: 1. Kota Batam bukan merupakan daerah pertanian/daerah penghasil sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan daerah lain. 2. Tidak adanya pasar induk sebagai pusat distribusi bahan pokok strategis dan pengendalian harga sehingga mengakibatkan harga komoditas ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. 3. Peningkatan curah hujan yang berpotensi mendorong kenaikan harga bahan pangan seperti cabai merah, bawang merah dan komoditas sayuran dikarenakan berkurangnya pasokan dan gangguan produksi. 4. Potensi peningkatan demand menjelang Bulan Suci Ramadhan Tahun 2022. 5. Kondisi cuaca dan besar gelombang mempengaruhi distribusi barang (angin musim utara) menyebabkan keterbatasan kapasitas pelayaran dalam mendistribusikan barang. 6. Belum adanya pelabuhan khusus bongkar muat bahan pokok sehingga pendistribusian barang kurang lancar. 7. Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di masyarakat. 8. Penerapan PMK 173 Tahun 2021 mengalami kendala masih banyak Pelaku Usaha/Distributor Batam yang belum melaksanakannya karena belum memahami aturan tersebut serta Penerapan PMK 173/2021 yang melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) masih belum dilaksanakan secara maksimal karena sistem sering bermasalah (error System). Akibat belum maksimalnya pelaksanaan PMK 173/2021 menyebabkan terganggunya arus masuk barang kebutuhan pokok ke Kota Batam yang berakibat akan terjadinya kekosongan persediaan barang kebutuhan pokok di Kota Batam. Dengan terganggunya arus masuk barang kebutuhan pokok, diperkirakan khususnya stok komoditi minyak goreng yang ada pada distributor hanya akan dapat bertahan kurang lebih

untuk 10 (sepuluh) hari.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam Triwulan I Tahun 2022 difokuskan pada upaya untuk menjaga ketersediaan dan menjaga kestabilan distribusi pangan strategis dengan mendorong ketahanan pangan daerah. Beberapa upaya yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam dalam pengendalian inflasi sebagai berikut: 1. Melaksanakan rapat TPID Kota Batam yang di hadiri para Anggota TPID Kota Batam dalam upaya pengendalian Inflasi daerah Kota Batam. 2. Melakukan pemantauan harga komoditas strategis secara lebih insentif dan akurat. 3. Melakukan Pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok agar keterjangkauan harga tetap stabil. 4. Meningkatkan kapasitas produksi pangan daerah dengan mengoptimalkan potensi pertanian di Kota Batam untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain. 5. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengambil langkah maju mengintervensi harga minyak goreng dengan melaksanakan Operasi Pasar murah komoditi minyak goreng dengan harga Rp.40.000- untuk 4 liter. 6. Pemerintah Kota Batam bersama dengan Asosiasi Distributor/Pelaku usaha melaksanakan Operasi pasar murah menjelang bulan suci Ramadhan. 7. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Melaksanakan sembako murah Sebanyak 45.000 paket terdiri dari beras 5 kg gula 1 kg dan minyak 1 liter. Masyarakat cukup menebus satu paket sembako tersebut seharga Rp50.000. 8. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam melakukan pemasaran hasil pertanian Kota Batam menggunakan Kios Mobile dan Aplikasi bakulan. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan, juga guna mendukung usaha pertanian lokal agar mempunyai wadah menjual hasil pertaniannya sehingga diharapkan ada peningkatan pelayanan, baik ke petani maupun ke masyarakat. Pemasaran hasil pertanian melalui Kios Mobile dilaksanakan pada beberapa lokasi di Kota Batam dengan menggunakan mobil berjalan berisi komoditi strategis seperti cabe dan sayur sedangkan bakulan merupakan pemasaran hasil pertanian Kota Batam melalui daring/penjualan hasil pertanian melalui online. 9. Peresmian pasar TPID 3 di Bida trade Center Kelurahan Mangsa Kecamatan Sei Beduk. 10. Permasalahan yang dihadapi terkait penerapan PMK 173 Tahun 2021 telah dilakukan kordinasi dengan para pelaku usaha/Distributor, Bea Cukai, Dirjen Pajak dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. 11. Dalam rangka mendukung dan Fasilitasi UMKM di Kota Batam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam menyelenggarakan kegiatan dengan mengusung tajuk Temu Konsultasi Peraturan/Kebijakan Kepabeanaan dan Ekspor Bagi Usaha Mikro. Acara ini diadakan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi pada masing-masing UMKM yang hadir mewakili UMKM di Kota Batam sehingga dapat melakukan ekspor sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian Kota Batam.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam selama triwulan I Tahun 2022 yang berfokus pada 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif) selama triwulan I Tahun 2022 secara umum berdampak dalam menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok secara otomatis sebagai berikut: 1. Dengan adanya Rapat koordinasi TPID Kota Batam dapat diperoleh informasi mengenai kondisi ketersediaan bahan pokok strategis dan kendala-kendala yang dihadapi para instansi terkait dan Stakeholder terutama menjelang HBKN. 2. Dengan adanya pemantauan harga komoditas strategis harga Komoditas strategis tetap stabil. 3.

Dengan adanya pengawasan ketersediaan bahan pokok, persediaan bahan pokok Batam aman. 4. Peningkatan kapasitas produksi pangan daerah dengan mengoptimalkan potensi pertanian di Kota Batam menambah sedikit pasokan komoditas seperti cabe, bawang merah, sayuran sehingga mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain. 5. Dengan adanya sembako murah diharapkan dapat menekan harga sembako menjelang lebaran. Disamping itu juga untuk membantu masyarakat Kota Batam, khususnya bagi membutuhkan. 6. kegiatan operasi pasar menjelang bulan suci Ramadhan kegiatan operasi pasar menjelang bulan suci Ramadhan yang bertujuan menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok dan intervensi harga. 7. Kegiatan operasi Pasar komoditi minyak goreng yang dilaksanakan Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dengan harga Rp.40.000,- per 4 liter memiliki dampak yang baik dalam hal membantu dan meringankan beban warga serta langkah yang maju mengintervensi harga minyak goreng yang belakangan melonjak secara nasional. 8. Dengan diadakan Kegiatan temu konsultasi Peraturan/Kebijakan Kepabeanan dan Ekspor Bagi Usaha Mikro, Bea Cukai Batam dapat mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh UMKM di wilayah Kota Batam dan ada berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan khususnya oleh pengusaha UMKM.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam perlu meningkatkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sehingga pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam dapat terkendali. Adapun beberapa rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam pada tanggal 15 Februari 2022 sebagai berikut: 1. Diharapkan setelah rapat koordinasi TPID Kota Batam, sebaiknya di lanjutkan dengan rapat-rapat teknis dengan OPD/instansi terkait untuk membahas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. 2. Diharapkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terkait dengan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk dapat ditindak lanjuti Seperti Kabupaten Simalungun yang ingin memasok sembako di Kota Batam. 3. Terkait dengan PMK Nomor: 173/PMK.03/2021 tentang tata cara pembayaran, pelunasan, pengadministrasian pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan/atau ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diharapkan agar kendala yang dihadapi terkait penerapan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang masih belum dilaksanakan secara maksimal karena sistem sering bermasalah (error System) agar dapat dilakukan koordinasi ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehingga dampak yang menyebabkan terganggunya arus masuk barang kebutuhan pokok ke Kota Batam tidak terjadi.